

2024

BIJAK IKD MANTAP

KEBIJAKAN AKTIVASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL MELALUI INTEGRASI
PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN



REFORMER
RAHMAWANI, S.HUT
NDH 47



PROYEK PERUBAHAN PKN TK. II PUSLATBANG KDOD LAN SAMARINDA
TAHUN 2024

RINGKASAN EKSEKUTIF

BIJAK IKD MANTAP

KEBIJAKAN AKTIVASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL MELALUI INTEGRASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI TANA TIDUNG



Reformer bernama RAHMAWANI, S.Hut Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung.

Proyek Perubahan yang diwujudkan yaitu BIJAK IKD Mantap, Kebijakan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital melalui Integrasi Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Tana Tidung. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa dalam era digital, kebutuhan akan sistem identifikasi yang efisien dan aman semakin mendesak. Identitas Kependudukan Digital (IKD) muncul sebagai solusi untuk meningkatkan pengelolaan data kependudukan, mempercepat layanan publik, dan meningkatkan keamanan data pribadi. Pengembangan Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan bagian dari upaya modernisasi administrasi kependudukan di Indonesia, sejalan dengan tren global dalam digitalisasi layanan publik.

Identitas Kependudukan Digital bertujuan untuk menyediakan identitas digital yang valid dan diakui secara hukum bagi seluruh warga negara Indonesia. Identitas ini akan terintegrasi dengan berbagai layanan publik, mempermudah akses, serta meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam verifikasi identitas. Berdasarkan hal tersebut diperlukan implementasi proyek perubahan yaitu aktivasi Identitas Kependudukan Digital dan Pemanfaatannya melalui integrasi Pelayanan Administrasi Kependudukan yang dilakukan dalam 3 (Tiga) Tahapan yaitu Tahapan Jangka Pendek, Jangka Menengah dan Jangka Panjang. Implementasi difokuskan pada Sosialisasi terkait Identitas Kependudukan Digital dan Pemanfaatannya serta Aktivasi Identitas Kependudukan Digital yang terintegrasi dengan Pelayanan Administrasi Kependudukan.

Hasil yang telah dicapai proyek perubahan adalah tercapainya keseluruhan target jangka pendek. Capaian Jangka Pendek adalah Penyusunan Pedoman Teknis, Tersosialisasinya Identitas Kependudukan Digital dan Pemanfaatannya serta Aktivasi Identitas Kependudukan Digital melampaui Target 150 Jiwa yang akan di aktivasi dalam jangka pendek Implementasi proyek perubahan.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah Puji dan Syukur senantiasa kami ucapkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala rahmat, ridha dan hidayah Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Proyek Perubahan pada rangkaian kegiatan Pelatihan Kepemimpinan (PKN) Tingkat II Angkatan IX. Proyek Perubahan ini sebagai salah satu tugas dan kewajiban sebagai peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II pada Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah (Puslatbang KDOD) LAN Samarinda.

Dalam penyusunan Laporan Proyek Perubahan ini, tentu saja tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, arahan, motivasi, dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan yang baik ini, kami menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Ibrahim Ali (Bupati Tana Tidung) dan Bapak Hendrik (Wakil Bupati Tana Tidung), atas perkenannya sehingga saya dapat mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan IX pada Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah (Puslatbang KDOD) LAN Samarinda.
2. Bapak Dr. Muhammad Aswad, M. Si (Kepala Puslatbang KDOD LAN Samarinda), atas ijin dan kesempatan sebagai peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan IX pada Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah (Puslatbang KDOD) LAN Samarinda.
3. Mohd. Idham Nur, S.Hut., M.AP (Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Tidung) selaku mentor atas perkenannya sehingga dapat mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan IX pada Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah (Puslatbang KDOD) LAN Samarinda.
4. Bapak Drs. H. Sanusi, M.Si (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara).
5. Bapak Edy Harsono, S.IP (Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Kabupaten Tana Tidung.
6. Bapak Dr. Hary Supriadi, SH.,MA selaku coach, atas bimbingan dan arahan yang membangun demi terlaksananya perencanaan, pelaksanaan dan penulisan Proyek Perubahan ini.
7. Bapak Dr. Felix Joni Darjoko, Ak.,M.Ec.Dev selaku penguji, atas saran dan arahan dalam pelaksanaan Implementasi Proyek Perubahan.
8. Tim kerja dan para staf kami yang telah memberikan kontribusi terbaiknya untuk kami dan saling berkoordinasi dalam penyusunan Laporan Proyek Perubahan ini.
9. Para Widyaiswara, PIC, Koordinator dan seluruh staf Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah (Puslatbang KDOD) LAN Samarinda.
10. Keluarga besar, atas dukungan, doa dan cintanya.
11. Teman-teman PKN Tingkat II Angkatan IX tahun 2024, atas semangat dan masukannya dalam penyusunan, pelaksanaan dan penulisan Proyek Perubahan ini .
12. Seluruh pihak yang belum sempat disebutkan, atas segala saran, masukan dan koreksinya.

Besar harapan kami semoga melalui Diklat PKN Tingkat II ini kami dapat membuat Proyek Perubahan dan selanjutnya dapat diimplementasikan secara berkelanjutan sehingga memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat dan bermanfaat untuk Instansi dan stakeholders terkait lainnya. Wassalamualaikum Wr. Wb...

Rahmawani

DAFTAR ISI

- 1 RINGKASAN EKSEKUTIF
- 2 KATA PENGANTAR
- 3 DAFTAR ISI
- 6 RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN
- 12 LAPORAN IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN
- 15 KOORDINASI, KOLABORASI DAN FGD BERSAMA STAKEHOLDER
- 23 CAPAIAN AKTIVASI IKD
- 37 SIMPULAN DAN SARAN

BIODATA REFORMER

RAHMAWANI, S.Hut

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung



Pengalaman Jabatan:

**Kasubbag Perencanaan Program dan Keuangan Dinas
Kehutanan dan Perkebunan Kab Tana Tidung**

**Kabid Kehutanan dan Perkebunan Dinas Pertanian dan
Kehutanan Kab Tana Tidung**

**Sekretaris Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab
Tana Tidung**

Sekretaris BKPSDM Kab Tana Tidung

Suami

Achmad Fanani

Anak:

1.Raqilla Fahrezi

2.Abdillah Danish

3.Kayra Nadhifa



MENTOR

Mohd. Idham Nur, S.Hut.,MAP
Plt. Sekretaris Daerah
Kabupaten Tana Tidung



COACH



Dr. Hary Supriadi, S.H., M.A.

NIP. 196802231992031006

Pembina Utama Madya (IV/d)

PENDIDIKAN

S1 Fak Hukum Univ Lambung Mangkurat, Banjarmasin (1991)

S2 Urban Management, IHS-Eramus Univ. Rotterdam (1999)

S3 Ilmu Administrasi, FIA Unibraw, Malang (2007)

LAN-RI

Kepala Pusat Kajian Desentralisasi & Otda (2018)

Kepala Pusat Kajian Manajemen ASN (2019)

Widyaiswara Ahli Utama (2021)

PEMKAB BANJAR

Asisten Ekobang Kesra (2010)

Asisten Pemerintahan (2013)

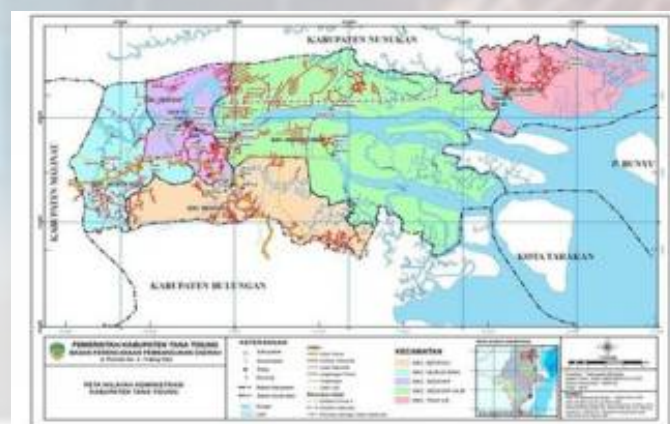
Kepala Bappeda Litbang (2016)

RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN LATAR BELAKANG

Kabupaten Tana Tidung merupakan Kabupaten Termuda di Provinsi Kalimantan Utara yang dibentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 34 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 100). Ibukota Kabupaten Tana Tidung berkedudukan di Tideng Pale Kecamatan Sesayap yang memiliki luas wilayah ± 4.059 km², dengan jumlah penduduk 28.684 Jiwa (Data DKB Semester 2 Tahun 2023).

Wilayah Kabupaten Tana Tidung terdiri 5 kecamatan dan 32 desa, memiliki karakter masyarakat yang majemuk menjadi hambatan tersendiri bagi Kabupaten Tana Tidung untuk masyarakat mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan. Salah satunya adalah jarak tempuh serta biaya transportasi yang tinggi untuk datang ke kantor Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten, Hal ini menyebabkan rasa enggan masyarakat untuk mengurus dokumen administrasi kependudukannya.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Bidang urusan Administrasi Kependudukan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah kabupaten. Sesuai dengan tugas dan fungsinya termasuk dalam Misi Ke 6 RPJMD Kabupaten Tana Tidung 2021-2026 yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.



Merujuk pada misi tersebut, dalam rangka mewujudkan tujuan yaitu meningkatkan implementasi reformasi birokrasi menuju KTT DIGITAL dan MELAYANI.

Seiring dengan perkembangan Teknologi Komunikasi dan informasi maka kualitas pelayanan yang prima menjadi hal utama yang menjadi tuntutan masyarakat, salah satu tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah kualitas pelayanan publik. Untuk mengatasi masalah belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik dalam hal kepemilikan dokumen administrasi kependudukan di Kabupaten Tana Tidung perlu dilakukan strategi dan langkah-langkah kebijakan yang berisikan program- program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran.



PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Salah satu penyelenggaraan pelayanan yang belum optimal di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung adalah pelayanan terkait aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) hal ini disebabkan oleh Belum begitu disadarinya arti pentingnya Identitas Kependudukan Digital, belum banyak diperlukannya dan dipergunakannya IKD dalam pelayanan publik dan masih belum banyak dirasakannya masyarakat manfaat secara langsung oleh ada atau tidak adanya Identitas Kependudukan Digital.

Kondisi saat ini untuk melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital, tidak cukup hanya menginstall Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), akan tetapi masyarakat harus datang ke kantor Disdukcapil untuk mendapatkan kode QR agar aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) bisa digunakan Sehingga Minat masyarakat untuk hanya Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) masih kurang. Saat ini instruksi dari Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pada Tahun 2024 untuk Kabupaten/Kota agar dapat menyelesaikan Target Aktivasi Identitas Kependudukan Digital sebesar 30 % dari jumlah Wajib KTP.

Data PDAK Pelayanan Juni 2024 Target Aktivasi Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Tana Tidung sebanyak 5.814 jiwa dan Realisasi sebesar 1.133 Jiwa. Disdukcapil Kabupaten Tana Tidung baru menyelesaikan sebesar 19,49 % dari Capaian 30 % sedangkan dari Capaian Wajib Rekam sekitar 5,80 %.



Berdasarkan Data Realisasi Aktivasi Identitas Kependudukan di Kabupaten Tana Tidung yang baru mencapai 19,49 % dari Target 30 % dan 5,80 % dari Target Wajib KTP (PDAK Pelayanan Juni Tahun 2024) maka diperlukan Langkah-langkah agar target Aktivasi Identitas Kependudukan Digital) dapat terus ditingkatkan yaitu Optimalisasi Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) melalui Pelayanan Administrasi Kependudukan yang terintegrasi dan merupakan Strategi Percepatan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital Bersama dengan Pelayanan Administrasi Kependudukan lainnya.

JUMLAH AKTIVASI IDENTITAS
KEPENDUDUKAN DIGITAL
PER 16 Juni 2024

NO.	KAB/KOTA/ PROVINSI	TARGET IKD 30% PEREKAMAN (JIWA)	AKTIVASI IKD	%
1	BULUNGAN	34.830	3.796	10,90 %
2	MALINAU	17.518	1.904	10,87 %
3	NUNUKAN	47.172	3.607	7,65 %
4	TANA TIDUNG	5.814	1.133	19,49 %
5	TARAKAN	52.025	4.218	8,11 %
	KALIMANTAN UTARA	157.359	14.658	9,32 %

Sumber data : PDAK Pelayanan IKD, 16 Juni 2024



PROYEK PERUBAHAN

" BIJAK IKD MANTAP "

KEBIJAKAN AKTIVASI IKD MELALUI INTEGRASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN TANA TIDUNG



BIJAK IKD MANTAP merupakan Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan khususnya peningkatan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) melalui Integrasi Pelayanan Administrasi Kependudukan yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung. Kebijakan Aktivasi IKD melalui Integrasi Pelayanan Administrasi Kependudukan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan Cakupan Layanan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) tetapi juga untuk memaksimalkan pemanfaatannya serta memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat Kabupaten Tana Tidung.

Berdasarkan Isu Strategis, Belum Optimalnya Capaian Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan yaitu Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan Pemanfaatannya serta Masih rendahnya target kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelayanan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Tana Tidung yang masih jauh dari Target Nasional yaitu 30 % dari penduduk yang Wajib KTP yaitu masih 5,80%.

TUJUAN

JANGKA PENDEK

1. Terbentuknya Tim kolaborasi sinegritas dan Integrasi Pelayanan IKD dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan.
2. Tersediannya Pedoman Teknis, SOP dan Standar Pelayanan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Terintegrasi dengan Pelayanan Administrasi Kependudukan.
3. Terbangunnya komitmen / dukungan bersama para pihak / stakeholder dalam Pelaksanaan Aktivasi Layanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan Memaksimalkan Pemanfaatannya.



JANGKA MENENGAH

1. Tersedianya Regulasi Pelayanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Terintegrasi dengan Pelayanan Administrasi Kependudukan.
2. Terlaksananya Rencana aksi yang telah disusun dan ditetapkan. melalui Sosialisasi, FGD serta Pelaksanaan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) secara berkelanjutan.
3. Pembangunan kerjasama dengan Stakeholder/para pihak yang berkepentingan dalam pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD).



JANGKA PANJANG

Terlaksananya Cakupan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital sesuai Target.





MANFAAT INTERNAL BAGI OPD DAN INSTANSI

Manfaat bagi Organisasi :

- Sebagai langkah inovatif dalam meningkatkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung serta Upaya peningkatan Capaian aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan Pemanfaatannya.
- Meningkatkan sinergitas dan Kerjasama antar Aparatur Internal dan Masyarakat.
- Mendukung Transformasi Digital Layanan Publik dan Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Mudah, Cepat, Profesional dan Efisien.



MANFAAT PROYEK PERUBAHAN

Manfaat bagi Instansi :

- Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Tana Tidung.
- Mempermudah dan mempercepat transaksi pelayanan publik atau privat dalam bentuk digital dan IKD menjadi Kunci Akses SPBE Prioritas dalam mendukung Transformasi Digital Pelayanan Publik.

MANFAAT EKSTERNAL BAGI MASYARAKAT DAN STAKEHOLDERS

Manfaat bagi Masyarakat:

- Mendukung Transformasi Digital Layanan Publik, Perlindungan Data Pribadi dan Meningkatkan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan serta mempermudah akses masyarakat ke pelayanan publik.

Manfaat bagi Stakeholders :

- Mempermudah dan mempercepat transaksi pelayanan publik dalam mendukung percepatan Transformasi Digital dan Pemanfaatan Data Administrasi Kependudukan.



OUTPUT DAN OUTCOME PROYEK PERUBAHAN

OUTPUT



1. Pedoman Teknis atau Regulasi terkait Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang Terintegrasi dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan.
2. SK (Surat Keputusan) Tim Agile.
3. Dokumen Komitmen dukungan/pakta integritas para stakeholder dalam Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Tana Tidung.
4. Dokumen rencana kerja / rencana Aksi Tim.
5. Laporan dan Dokumentasi Pelaksanaan kerja/aksi tim dengan Target Aktivasi IKD sekitar 150 orang.



OUTCOME



1. Meningkatnya kolaborasi dan sinergitas dalam kegiatan tertib Administrasi Kependudukan.
2. Meningkatnya Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Tana Tidung.

LAPORAN IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN

CAPAIAN HASIL IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN



MEMBANGUN TIM AGILE



KONSULTASI DENGAN MENTOR



MENYUSUN RENCANA KERJA TIM



Lampiran
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
Nomor 6601/2024
TENTANG
RENCANA KERJA TIM

RENCANA KERJA TIM

PELAYANAN ARTISIS DI BIDANG PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUKUKAN

NO	RENCANA KERJA	PELAYANAN ARTISIS	PELAYANAN ADMINISTRASI	PELAYANAN KEPENDUKUKAN	PELAYANAN ARTISIS	PELAYANAN ADMINISTRASI	PELAYANAN KEPENDUKUKAN	PELAYANAN ARTISIS	PELAYANAN ADMINISTRASI	PELAYANAN KEPENDUKUKAN
1	Artis	Artis	Artis	Artis	Artis	Artis	Artis	Artis	Artis	Artis
2	Artis	Artis	Artis	Artis	Artis	Artis	Artis	Artis	Artis	Artis
3	Artis	Artis	Artis	Artis	Artis	Artis	Artis	Artis	Artis	Artis
4	Artis	Artis	Artis	Artis	Artis	Artis	Artis	Artis	Artis	Artis

Lampiran
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
Nomor 6601/2024
TENTANG
RENCANA KERJA TIM

NO	RENCANA KERJA	PELAYANAN ARTISIS	PELAYANAN ADMINISTRASI	PELAYANAN KEPENDUKUKAN	PELAYANAN ARTISIS	PELAYANAN ADMINISTRASI	PELAYANAN KEPENDUKUKAN	PELAYANAN ARTISIS	PELAYANAN ADMINISTRASI	PELAYANAN KEPENDUKUKAN
1	Artis	Artis	Artis	Artis	Artis	Artis	Artis	Artis	Artis	Artis
2	Artis	Artis	Artis	Artis	Artis	Artis	Artis	Artis	Artis	Artis
3	Artis	Artis	Artis	Artis	Artis	Artis	Artis	Artis	Artis	Artis
4	Artis	Artis	Artis	Artis	Artis	Artis	Artis	Artis	Artis	Artis

RESEARCH METHODOLOGY

RESEARCH DESIGN

RESEARCH INSTRUMENTS

Qualitative Research

Quantitative Research

Interview Guide

Questionnaire

Data Collection

Data Analysis

KOORDINASI, KOLABORASI DAN FGD BERSAMA STAKEHOLDER

Stakeholders: BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Bappeda dan Disdukcapil



Stakeholders: KPU Tana Tidung



Stakeholders:

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kaltara,
Kecamatan Betayau, Desa Mendupo, Desa Periuk, Desa
Buong Baru, Desa Kujau, Desa Maning dan Desa Bebakung.





Stakeholders: Rumah Sakit Tanjung Keramat Kecamatan Tana Lia



Stakeholders: Desa Tana Merah Barat



Stakeholders: Kecamatan Tana Lia

PELAKSANAAN AKTIVASI IKD

Kecamatan Betayau

Pelayanan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) pada saat Sosialisasi Pelayanan BEKESAH di Kecamatan Betayau yaitu Inovasi Disdukcapil Prov.Kaltara tentang Pelayanan Pemutakhiran Data Kependudukan di Teras Rumah.



Kecamatan Sesayap

Pelayanan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) bersama Pelayanan Perekaman KTP EL Pemula di SMA Terpadu Unggulan Tana Tidung.



Kecamatan Tana Lia

Pelayanan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) bersama Pelayanan Pencatatan Sipil di Desa Tanah Merah Barat Kecamatan Tana Lia.



Kecamatan Sesayap Hilir

Pelayanan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Desa Menjelutung bersama Pemutakhiran Data Kependudukan di Teras Rumah.



RSUD Tanjung Keramat

Pelayanan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Rumah Sakit Tanjung Keramat Kecamatan Tana Lia.

PELAKSANAAN AKTIVASI IKD

Kantor Disdukcapil

Bersama Kepala Pengadilan Agama Tanjung Selor dan Hakim saat Pelaksanaan Layanan Terpadu Cerai dan Pendaftaran Isbat Nikah yang diintegrasikan dengan Pelayanan Aktivasi IKD.



Kecamatan Tana Lia

Pelayanan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) bersama Pelayanan Perekam KTP EL Pemula di Kecamatan Tana Lia.



Kantor Disdukcapil

Pelayanan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Terintegrasi dengan Pelayanan Adminduk di Kantor Disdukcapil Tana Tidung



Aktivasi IKD pada Kegiatan IRAU Ke 7 Kab. Tana Tidung



Pelaksanaan Kegiatan Aktivasi IKD di Event Pesta Rakyat IRAU, setelah melakukan Aktivasi IKD Masyarakat mendapatkan Souvenir dari Disdukcapil Kab.Tana Tidung.

Sosialisasi dan Aktivasi IKD pada Saat Rapat Koordinasi Analisa Data Ganda, TMS serta data Invalid Bersama Stakeholder dan PPK Se Kabupaten Tana Tidung.



Stakeholders:

KPUD, Bawaslu, Kodim 9014, Polres, Kesbangpol dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)



Sosialisasi dan Aktivasi IKD saat Menjadi Narasumber di Acara Bimtek RT dan RW Se Kabupaten Tana Tidung.



Stakeholders: Dinas Sosial dan PMD Kab. Tana Tidung dan Ketua RT dan RW Se Kabupaten Tana Tidung



CAPAIAN AKTIVASI IKD

CAPAIAN IKD sd 05 Sept 2024

Capaian Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Tana Tidung pada saat Rancangan Proyek Perubahan sebesar 1.133 Jiwa atau 5,80 % dari Target 30% Nasional (Data PDAK 24 Juni 2024). Target Implementasi Jangka Pendek Penambahan Capaian melampaui Target yang ditetapkan yaitu sebesar 1.790 Jiwa atau 9,11 % dari Target Nasional 30 % dan bertambah sebesar 657 Jiwa.

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jedang Dada Lantai 3, Jalan Rambutan Nomor 66, Kode Pos 77122
Pia 03: dukcapil.kaltengprov@gmail.com Website: dukcapil.kaltengprov.go.id
TANJUNG SELOR

Tanjung Selor, 05 September 2024

Nomor: 400.12.4.176.1 DKPS.18
Sifat: Penting
Lampiran: 1 (Satu)
Hal: Aktifasi Identitas Kependudukan Digital

Yth. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Utara

Tema:

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Bangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital, dan berdasarkan Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 terkait target identitas Kependudukan Digital (IKD) sebesar 30 %, untuk itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota agar dapat:

1. Melakukan setiap warga yang berurusan atau melakukan pelayanan Administrasi Kependudukan di Dinas / Mail Pelayanan Publik untuk melakukan aktivasi IKD di masa pelayanan tersebut (Aktivasi Identitas Kependudukan Digital - IKD).
2. Melakukan kegiatan aktivasi IKD ke Organisasi Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Desa, Kecamatan/Kecamatan Masyarakat di lingkungan Kabupaten / Kota masing-masing, termasuk melalui grup WhatsApp.
3. Melakukan Sosis / Sosialisasi/Sosialisasi untuk melaksanakan aktivasi IKD pada saat kegiatan pelayanan prima di SMA/SMK/Sebagai lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara menyediakan layanan aktivasi IKD dengan Link Zoom: bit.ly/IKD2024M23, ataupun untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Call Center Aduan 0811 533 6123.

Adapun progres identitas Kependudukan Digital (IKD) per 05 September 2024 adalah sebagai berikut:

No	Kab / Kota	Progres Rekam	PERCENTAGE PROGRES REKAM (IKD)	Target IKD	PERCENTAGE TARGET IKD (100%)	Total IKD
1	Bulungan	110.912	3,74	30.344	12,46	4.356
2	Malinau	88.880	4,32	17.888	14,08	3.488
3	Marauke	182.345	2,72	47.774	9,26	4.336
4	Tana Tidung	18.843	9,11	8.888	38,38	1.790
5	Kota Tarakan	175.035	2,82	52.511	9,51	4.365
	Total	629.896	3,59	186.879	31,36	17.878

Dengan diampunkan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Kepala Dinas,
Drs. H. Rahmat, M.Si
Pembantu Utama Bidang P1 & P2
NIP. 197002020090311001

Tembusan diampunkan kepada Yth:
1. Gubernur Kalimantan Utara di Tanjung Selor (sebagai laporan).
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor.
3. Bupati dan Walikota se-Provinsi Kalimantan Utara.

Capaian IKD Bulan Agustus

Capaian IKD Bulan Juli

Capaian IKD Bulan Juni

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jedang Dada Lantai 3, Jalan Rambutan Nomor 66, Kode Pos 77122
Pia 03: dukcapil.kaltengprov@gmail.com Website: dukcapil.kaltengprov.go.id
TANJUNG SELOR

Tanjung Selor, 01 Agustus 2024

Nomor: 400.12.4.176.1 DKPS.18
Sifat: Penting
Lampiran: 1 (Satu)
Hal: Aktifasi Identitas Kependudukan Digital

Yth. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Utara

Tema:

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Bangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital, dan berdasarkan Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 terkait target identitas Kependudukan Digital (IKD) sebesar 30 %, untuk itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota agar dapat:

1. Melakukan setiap warga yang berurusan atau melakukan pelayanan Administrasi Kependudukan di Dinas / Mail Pelayanan Publik untuk melakukan aktivasi IKD.
2. Melakukan kegiatan aktivasi IKD ke Organisasi Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal lingkungan Kabupaten / Kota masing-masing.
3. Melakukan Sosis / Sosialisasi/Sosialisasi untuk melaksanakan aktivasi IKD pada saat kegiatan pelayanan prima di SMA/SMK/Sebagai lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara menyediakan layanan aktivasi IKD dengan Link Zoom: bit.ly/IKD2024M23, ataupun untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Call Center Aduan 0811 533 6123.

Adapun progres identitas Kependudukan Digital (IKD) per 31 Juli 2024 adalah sebagai berikut:

No	Kab / Kota	Progres Rekam	Target IKD	Total	Progres IKD	Prosentase IKD
1	Bulungan	110.912	30.344	141.256	11.092	11,40
2	Malinau	88.880	17.888	106.768	10.337	10,57
3	Marauke	182.345	47.774	230.119	4.021	8,41
4	Tana Tidung	18.843	8.888	27.731	1.048	11,40
5	Kota Tarakan	175.130	52.511	227.641	4.686	8,30
	Total	629.896	186.879	816.775	31.184	10,97

Dengan diampunkan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Kepala Dinas,
Drs. H. Rahmat, M.Si
Pembantu Utama Bidang P1 & P2
NIP. 197002020090311001

Tembusan diampunkan kepada Yth:
1. Gubernur Kalimantan Utara di Tanjung Selor (sebagai laporan).
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor.
3. Bupati dan Walikota se-Provinsi Kalimantan Utara.

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jedang Dada Lantai 3, Jalan Rambutan Nomor 66, Kode Pos 77122
Pia 03: dukcapil.kaltengprov@gmail.com Website: dukcapil.kaltengprov.go.id
TANJUNG SELOR

Tanjung Selor, 01 Juli 2024

Nomor: 400.12.4.176.1 DKPS.18
Sifat: Penting
Lampiran: 1 (Satu)
Hal: Aktifasi Identitas Kependudukan Digital

Yth. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Utara

Tema:

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Bangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital, dan berdasarkan Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 terkait target identitas Kependudukan Digital (IKD) sebesar 30 %, untuk itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota agar dapat:

1. Melakukan setiap warga yang berurusan atau melakukan pelayanan Administrasi Kependudukan di Dinas / Mail Pelayanan Publik untuk melakukan aktivasi IKD.
2. Melakukan kegiatan aktivasi IKD ke Organisasi Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal lingkungan Kabupaten / Kota masing-masing.
3. Melakukan Sosis / Sosialisasi/Sosialisasi untuk melaksanakan aktivasi IKD pada saat kegiatan pelayanan prima di SMA/SMK/Sebagai lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara menyediakan layanan aktivasi IKD dengan Link Zoom: bit.ly/IKD2024M23, ataupun untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Call Center Aduan 0811 533 6123.

Adapun progres identitas Kependudukan Digital (IKD) per 31 Juli 2024 adalah sebagai berikut:

No	Kab / Kota	Progres Rekam	Target IKD	Total	Progres IKD	Prosentase IKD
1	Bulungan	110.912	30.344	141.256	11.092	11,40
2	Malinau	88.880	17.888	106.768	10.337	10,57
3	Marauke	182.345	47.774	230.119	4.021	8,41
4	Tana Tidung	18.843	8.888	27.731	1.048	11,40
5	Kota Tarakan	175.130	52.511	227.641	4.686	8,30
	Total	629.896	186.879	816.775	31.184	10,97

Dengan diampunkan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Kepala Dinas,
Drs. H. Rahmat, M.Si
Pembantu Utama Bidang P1 & P2
NIP. 197002020090311001

Tembusan diampunkan kepada Yth:
1. Gubernur Kalimantan Utara di Tanjung Selor (sebagai laporan).
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor.
3. Bupati dan Walikota se-Provinsi Kalimantan Utara.

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jedang Dada Lantai 3, Jalan Rambutan Nomor 66, Kode Pos 77122
Pia 03: dukcapil.kaltengprov@gmail.com Website: dukcapil.kaltengprov.go.id
TANJUNG SELOR

Tanjung Selor, 3 Juni 2024

Nomor: 400.12.4.176.1 DKPS.18
Sifat: Penting
Lampiran: 1 (Satu)
Hal: Aktifasi Identitas Kependudukan Digital

Yth. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Utara

Tema:

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Bangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital, dan berdasarkan Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 terkait target identitas Kependudukan Digital (IKD) sebesar 30 %, untuk itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota agar dapat:

1. Melakukan setiap warga yang berurusan atau melakukan pelayanan Administrasi Kependudukan di Dinas/Mail pelayanan publik untuk melakukan aktivasi IKD.
2. Melakukan kegiatan aktivasi IKD ke Organisasi Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal lingkungan Kabupaten/Kota masing-masing.
3. Melakukan Sosialisasi/Sosialisasi/Sosialisasi untuk melaksanakan aktivasi IKD pada saat kegiatan pelayanan prima di SMA/SMK/Sebagai lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara menyediakan layanan aktivasi IKD dengan Link Zoom: bit.ly/IKD2024M23, ataupun untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Call Center Aduan 0811 533 6123.

Adapun progres identitas Kependudukan Digital (IKD) per 3 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

No	Kab/Kota	Progres Rekam	Target IKD	Total	Progres IKD	Prosentase IKD
1	Bulungan	110.912	30.344	141.256	3.711	10,84
2	Malinau	88.880	17.888	106.768	1.919	10,38
3	Marauke	182.345	47.774	230.119	5.450	11,31
4	Tana Tidung	18.843	8.888	27.731	1.008	11,40
5	Kota Tarakan	175.276	52.511	227.787	3.558	11,81
	Total	629.896	186.879	816.775	15.666	8,81

Dengan diampunkan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Kepala Dinas,
Drs. H. Rahmat, M.Si
Pembantu Utama Bidang P1 & P2
NIP. 197002020090311001

Tembusan diampunkan kepada Yth:
1. Gubernur Kalimantan Utara di Tanjung Selor (sebagai laporan).
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor.
3. Bupati dan Walikota se-Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor.
4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor.

2. Deskripsi Kepemimpinan Strategis

Hal yang sangat penting dalam implementasi proyek perubahan ini adalah bagaimana inovasi diimplementasikan dan dilaksanakan dalam proses Perencanaan Pembangunan. Banyak kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan suatu kebijakan walaupun proses dan mekanismenya sudah dijalankan sesuai mekanisme yang ada. Kendala kelembagaan, pendanaan, koordinasi bahkan sumberdaya manusia yang menjadi kelompok sasaran dari kebijakan ini juga menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan.

Tantangan yang dihadirkan di era disrupsi saat ini mengharuskan pemerintah daerah untuk bekerja dengan cara-cara baru. Di samping itu, tuntutan masyarakat terhadap kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, murah dan Profesional terus meningkat. Untuk itu, pemerintah daerah terus melakukan terobosan kebijakan untuk menghadapi kondisi tersebut. Berinovasi dapat menjadi cara efektif dan berperan sebagai katalisator dalam mengatasi berbagai hambatan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Menyadari bahwa proyek perubahan ini merupakan kegiatan yang mempengaruhi angka Indeks Pelayanan Publik, maka kendala kendala yang akan timbul dalam tataran implementasinya dapat diinventarisir. Pendanaan untuk implementasi, diantisipasi dengan sharing budget kegiatan yang sudah ada dalam organisasi dalam mendukung capaian implementasi aksi perubahan untuk jangka pendek.



Implementasi Strategi Marketing DUKUNCAN STAKEHOLDERS

BUPATI TANA TIDUNG



KADIS DUKCAPIL PROV. KALTARA

ASISTEN 2 (PLT. KADIS

DUKUNCAN PROYEK PERUBAHAN



KADIS KESEHATAN



KABAN BPKAD



CAMAT SESAYAP HILIR





KPUD TANA TIDUNG



BPJS KESEHATAN

Kadis DPMPPTSP



Kabid PIAR dan Pemanfaatan Data Disdukcapil Prov Kaltara



KABAN BAPPEDA & LITBANG



Disdukcapil

CAMAT BETAVAU

DESIMINASI DAN PUBLIKASI PROYEK PERUBAHAN



LAUNCHING PROYEK PERUBAHAN



PEMANFAATAN SUMBER DAYA ORGANISASI



KEBERLANJUTAN PROYEK PERUBAHAN

Proyeksi keberlangsungan Proyek perubahan tergambar dari capaian Tahapan rencana strategis jangka pendek yang telah dilaksanakan dalam Proyek Perubahan. Tindak lanjut kegiatan jangka menengah dan Capaian tahapan rencana strategis jangka pendek merupakan landasan untuk merealisasikan capaian tahapan rencana strategis jangka menengah dan jangka panjang.



PLACE A PHOTO CAPTION HERE



MOHD IKAN YUSUF MAF
NRP 10004248901121000

keterkaitan dengan Reformasi Birokrasi Tematik dan Manfaat Proyek Perubahan Dalam bentuk Monetasi



Keterkaitan identitas kependudukan dengan reformasi birokrasi tematik khususnya Digitalisasi Administrasi Pemerintahan bisa menjadi sangat penting karena identitas kependudukan yang terintegrasi dengan baik dapat meningkatkan efisiensi dalam layanan publik dan memperkuat akuntabilitas birokrasi. Dengan adanya identitas kependudukan yang valid dan terpercaya, birokrasi dapat lebih mudah melakukan verifikasi identitas dalam berbagai proses Administratif seperti pelayanan Kesehatan, Pendidikan, Perizinan dan Bantuan Sosial.

Reformasi birokrasi yang mengintegrasikan Identitas kependudukan dapat mengurangi birokrasi ganda, penyalahgunaan kewenangan, serta meminimalkan resiko kecurangan atau manipulasi data. Ini berarti pelayanan publik dapat lebih cepat dan efisien karena proses identifikasi dan verifikasi menjadi lebih mudah dan cepat dilakukan.

Selain itu, identitas kependudukan yang terpusat dan terintegrasi juga memungkinkan pemerintah untuk merancang kebijakan publik yang lebih tepat sasaran dan efektif, dengan basis data yang lebih akurat dan terpercaya. Hal ini mendukung transparansi dan akuntabilitas birokrasi dalam menjalankan tugasnya untuk melayani masyarakat dengan lebih baik.

Secara keseluruhan, keterkaitan ini efisien bahwa pengelolaan identitas kependudukan yang baik dapat menjadi pondasi penting dalam upaya reformasi birokrasi untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Manfaat Proyek Perubahan dalam bentuk Monetasi adalah berupa efisiensi atau mengurangi beban pengeluaran yang bisa dilakukan dalam pelaksanaan Proyek perubahan di mana biasanya Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan terbagi menjadi Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Pelayanan Pencatatan Sipil dan Pelayanan Pemutakhiran data serta Aktivasi Identitas Kependudukan Digital, sehingga apabila bisa dilaksanakan melalui pelayanan terintegrasi bisa menghemat anggaran sekitar 30% dari biaya Pelayanan Jemput Bola. Untuk pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan yang biasanya memerlukan biaya untuk datang ke kantor Pelayanan Disdukcapil. Dengan dilaksanakannya Pelayanan Terintegrasi bisa mengurangi beban pengeluaran Masyarakat baik itu waktu dan Biaya.



Rencana Implementasi Jangka Menengah dan Panjang



TAHAP JANGKA MENENGAH

- Terlaksananya Rencana aksi yang telah disusun dan ditetapkan, dengan Sosialisasi, FGD serta Pelaksanaan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) secara berkelanjutan.
- Pembangunan Kerjasama dengan Stakeholder/para pihak yang berkepentingan dalam pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD).

TAHAP JANGKA PANJANG

- Terlaksananya Cakupan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital sesuai Target.
- Melaksanakan Evaluasi dan Pelaporan.



PEMBERDAYAAN ORGANISASI PEMBELAJAR

Implementasi Strategi Pengembangan Kompetensi Tim dan Potensi Diri untuk adopsi proyek perubahan paling tidak memuat siapa pihak yang terdampak proyek perubahan, kompetensi baru apa saja yang dibutuhkan, dan bagaimana cara (strategi) pengembang.

PEMBERDAYAAN ORGANISASI PEMBELAJAR

PIHAK TERDAMPAK	PERUBAHAN KOMPETENSI YANG DIBUTUHKAN	CARA PENGEMBANGAN KOMPETENSI (KLASIKAL / NON KLASIKAL)	HASIL
1. Tim Efektif	Memahami tentang tahapan kegiatan proyek perubahan, melaksanakan kinerja sesuai dengan target dan dapat bekerja dalam tim	Melaksanakan koordinasi dan kolaborasi dengan Tim Efektif serta mengikuti Pengembangan Kompetensi Klasikal dan Non Klasikal	Melaksanakan rapat kooordinasi, rapat evaluasi, menyusun konsep layanan, Menyusun pedoman, Rencana Aksi dan Pelaksanaan Aktivasi IKD dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan serta meningkatnya Kompetensi dan Capaian Kinerja
2. Masyarakat	Mampu menggunakan dan Memanfaatkan Identitas Kependudukan Digital	Melaksanakan Sosialisasi dan Aktivasi IKD dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Capaian Aktivasi IKD dan Pemanfaatannya dalam Pelayanan Publik



PENCEMBANGAN KOMPETENSI DIRI DAN TIM



PEMANFAATAN MATA PELATIHAN PILIHAN UNTUK PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN

DESKRIPSI PEMANFAATAN MATA PELATIHAN PILIHAN UNTUK PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN



MANAJEMEN PEMERINTAHAN

Materi Pelatihan ini memberi pengetahuan kepada peserta dengan mengimplementasikan fungsi manajemen dalam kaitanya dengan manajemen pemerintahan, hal hal yang dibahas mulai konsep Dasar Manajemen Pemerintahan, Manajemen Dalam Organisasi Pemerintahan, hingga Manajemen Pemerintahan Era Revolusi Industri 4.0. sehingga Peserta mampu mengimplementasikan Manajemen Pemerintahan di unit kerjanya masing-masing dengan baik dan benar.

HAK ASASI MANUSIA

Materi Pelatihan ini memberikan Pengetahuan pada peserta dan pada Implementasi Proyek Perubahan Bijak IKD Mantap bahwa Administrasi kependudukan yang baik adalah fondasi penting untuk perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia



INKLUSI GENDER, DISABILITAS DAN SOSIAL

Materi Pelatihan ini memberi pengetahuan kepada peserta agar mampu mengidentifikasi Langkah menerapkan Gender, Disability and Sosial (GEDSI) pada Proyek Perubahan Bijak IKD Mantap. GEDSI dapat dipahami sebagai sebuah pola pikir (mindset), proses, dan hasil (outcome) yang memastikan bahwa tidak ada yang termarginalisasi dalam program pembangunan dan pelayanan publik (no one left behind)



SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Pelaksanaan Proyek Perubahan berjalan dengan lancar dan efektif. Upaya untuk meningkatkan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Tana Tidung melalui Integrasi Pelayanan Administrasi Kependudukan mampu mencapai target jangka pendek sesuai dengan yang diharapkan dengan indikator-indikator:

1. Terlaksananya pelayanan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital terintegrasi dengan pelayanan administrasi kependudukan.
2. Terlaksananya Pelayanan Jemput Bola ke Desa, Kecamatan, Rumah sakit dan Pusat-pusat Keramaian di Kabupaten Tana Tidung.
3. Meningkatnya Capaian Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Tana Tidung, yang semula Capaian 5,80% per 16 juni 2024 menjadi 9,11% per 6 September 2024, ada kenaikan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital sebesar 657 jiwa dari target jangka pendek sebesar 150 jiwa.



SARAN

Saran setelah dilakukan berbagai upaya peningkatan Capaian dan Manfaat Identitas Kependudukan Digital melalui Integrasi Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Tana Tidung adalah sebagai berikut:

1. Penerapan Kebijakan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital melalui Integrasi Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Tana Tidung, dalam Pelaksanaannya sangat dibutuhkan kerjasama yang baik dan semua harus pro aktif antara pihak terkait dimulai dari masyarakat, perangkat Desa, Kecamatan, serta OPD terkait dengan petugas Dinas Dukcapil supaya berbagai strategi dalam Aktivasi Identitas Kependudukan dan Pelayanan Administrasi Kependudukan dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.
2. Perlu dilakukan sosialisasi dan Jemput Bola Pelayanan yang terus menerus kepada semua Masyarakat dan Stakeholders terkait mengenai Manfaat Identitas Kependudukan Digital dan Pelayanan Administrasi Kependudukan.





scan me

